



Peran Kejujuran Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih Dan Transparan: Studi Kasus Di Kabupaten Bengkayang

Fransiska Ria^{1*}, Lili Leria Sari², Sonia Dara Fortunata³, Kusnanto⁴

^{1,2,3,4}Institut Shanti Bhuana Bengkayang

^{1*}fria75455@gmail.com, ²lilileriansari@gmail.com, ³darasonia90@gmail.com, ⁴kusnanto@shantibhuana.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kejujuran dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan, dengan fokus pada studi kasus di Kabupaten Bengkayang. Kejujuran dianggap sebagai salah satu nilai penting yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi dokumentasi terkait kebijakan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kejujuran dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan di Kabupaten Bengkayang. Meskipun ada upaya transparansi anggaran, praktik korupsi dan nepotisme masih terjadi karena pengawasan yang lemah dan hubungan personal yang memengaruhi aliran dana. Masyarakat mengakui perbaikan, tetapi tantangan besar tetap ada. Pemerintah Kabupaten Bengkayang meraih capaian positif dalam kinerja pelayanan publik, namun masih perlu meningkatkan transparansi dan pengawasan untuk mencapai pemerintahan yang sepenuhnya bersih dan akuntabel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, dibutuhkan komitmen dari seluruh elemen pemerintah dan masyarakat, serta penguatan mekanisme kontrol dan pengawasan.

Kata Kunci: Kejujuran, Pemerintahan Bersih, Transparansi, Kabupaten Bengkayang, Integritas, Korupsi.

PENDAHULUAN

Kejujuran dalam konteks pemerintahan dapat didefinisikan sebagai sikap atau perilaku yang menunjukkan keterbukaan, integritas, dan ketulusan dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab publik. Pejabat publik yang jujur akan selalu bertindak berdasarkan nilai-nilai keadilan (Daulima, 2018), tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan atau penyelewengan wewenang demi kepentingan pribadi. Kejujuran ini menjadi dasar bagi terciptanya pemerintahan yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan berfungsi sebagai penjaga integritas di dalam sistem pemerintahan itu sendiri.

Hubungan kejujuran dengan etika dan moralitas pejabat publik sangat erat. Etika mengatur bagaimana pejabat publik harus bertindak dalam memenuhi kewajibannya, sementara moralitas mencerminkan nilai-nilai pribadi yang membimbing perilaku individu. Seorang pejabat publik yang memiliki moralitas yang tinggi dan beretika baik akan menjunjung tinggi prinsip kejujuran dalam menjalankan kebijakan, keputusan, dan pengelolaan sumber daya negara. Keduanya—etika dan moralitas—menjadi fondasi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, yang mana pejabatnya tidak terjebak dalam godaan korupsi atau manipulasi.

Pemerintahan yang bersih dan transparan memiliki ciri-ciri yang jelas, antara lain, sistem pengambilan keputusan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Semua kebijakan, pengeluaran anggaran, serta penggunaan sumber daya negara harus dapat diakses oleh masyarakat luas, sehingga mencegah praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Kebebasan dalam melihat, mendapatkan, dan mengakses informasi tentu akan membentuk sistem pemerintahan yang lebih bersih, transparan, serta meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat dalam setiap penyusunan kebijakan dan langkah-langkah yang berhubungan dengan kepentingan publik

(Azka & Najicha, 2022). Transparansi juga mencakup partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan, baik melalui saluran komunikasi langsung dengan pemerintah maupun melalui organisasi non-pemerintah yang berfokus pada pengawasan publik.

Ciri lain dari pemerintahan yang bersih adalah adanya akuntabilitas. Setiap tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan logis. Akuntabilitas ini akan tercapai jika pejabat publik menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip kejujuran, transparansi, dan efisiensi dalam menjalankan tugasnya. Dengan mengimplementasikan prinsip akuntabilitas sosial, masyarakat desa akan terlibat secara langsung dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa serta meminta pertanggungjawaban atas kebijakan dan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah (Ra'is, 2022). Pemerintah yang akuntabel memungkinkan masyarakat untuk menilai dan mengkritik kebijakan serta kinerja pemerintah, sehingga memperkuat demokrasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.

Teori yang mendasari pemerintahan yang baik, atau *Good Governance*, mengemukakan bahwa pemerintahan yang efektif harus memperhatikan prinsip-prinsip seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan penegakan hukum (Resmadiktia et al., 2023). Kejujuran adalah inti dari semua prinsip ini, karena tanpa kejujuran, transparansi dan akuntabilitas tidak dapat berjalan dengan baik. Pemerintah yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip *Good Governance* akan mendorong terciptanya sistem yang efisien, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, yang pada akhirnya membangun kepercayaan publik terhadap negara.

Kejujuran memainkan peran kunci dalam terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan. Tanpa kejujuran, segala upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan terbuka akan sia-sia. Sehingga individu yang berada dalam pemerintahan untuk mengedepankan nilai-nilai kejujuran dalam setiap langkah kebijakan yang diambil. Kejujuran bukan hanya merupakan tuntutan moral, tetapi juga kebutuhan praktis untuk memastikan tercapainya *Good Governance* yang sesungguhnya, yang pada akhirnya akan membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat (Segah, 2020).

Pemerintahan yang bersih dan transparan merupakan salah satu faktor utama dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan. Ketika pemerintah menjalankan tugasnya dengan prinsip integritas, kejujuran, dan keterbukaan, masyarakat akan merasa lebih aman dan percaya terhadap kebijakan yang diambil. Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik memungkinkan masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan (Alwan et al., 2024). Selain itu, pemerintahan yang bersih juga memberikan contoh yang baik bagi warga negara untuk berperilaku jujur dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Di banyak negara, termasuk di Indonesia, masalah korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan masih menjadi tantangan besar dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. "Ketua KPK Nawawi Pomolango menyampaikan laporan tentang penanganan 93 perkara korupsi ini dalam rapat kerja antara Komisi III DPR RI dengan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024" (Febriari, 2024). Korupsi, baik di tingkat lokal maupun nasional, menghambat pembangunan karena dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini juga menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan, sehingga menambah kesenjangan sosial. Di samping itu, praktik nepotisme, di mana jabatan publik diberikan berdasarkan hubungan keluarga atau kedekatan pribadi, menghambat profesionalisme dan efisiensi pemerintahan.

Penyalahgunaan kekuasaan sering kali terjadi ketika pejabat pemerintah menggunakan posisinya untuk meraih keuntungan pribadi atau mendukung kelompok tertentu. Penyalahgunaan kekuasaan terjadi ketika Badan atau Pejabat Pemerintahan membuat keputusan atau tindakan yang melebihi batas kewenangannya, menggabungkan kekuasaan secara tidak semestinya, dan bertindak sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaannya (Iftiani & Iswara, 2024). Hal ini menciptakan sistem pemerintahan yang tidak adil, di mana keputusan-keputusan yang diambil lebih mengutamakan kepentingan individu atau kelompok tertentu daripada kepentingan masyarakat

secara keseluruhan. Akibatnya, banyak kebijakan yang tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat, bahkan merugikan mereka. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya nilai kejujuran dalam menjalankan roda pemerintahan agar tercipta sistem yang adil dan merata.

Kejujuran menjadi kunci utama dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Ketika pejabat pemerintah menjunjung tinggi nilai kejujuran, mereka lebih cenderung untuk membuat keputusan yang adil dan transparan. Kejujuran juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang sangat penting untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik. Pemerintah yang jujur dan terbuka dalam melaksanakan kebijakan publik akan lebih mudah memperoleh dukungan dari masyarakat, yang pada gilirannya akan mempercepat pembangunan dan tercapainya kesejahteraan bersama.

Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan, perlu adanya upaya bersama dalam menegakkan prinsip kejujuran dalam setiap aspek pemerintahan. Proses ini perlu melibatkan pembangunan dan penguatan berbagai lembaga, sumber daya manusia, serta sumber daya lainnya secara berkelanjutan, dengan tujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang independen, efisien, dan jujur, yang menurut saya merupakan elemen utama dari tata pemerintahan yang baik (Berlian & Firdaus, 2022). Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan sistem pengawasan internal dan eksternal, memperkuat pendidikan moral dan etika bagi pejabat publik, serta memperbaiki sistem hukum yang dapat memberikan sanksi tegas terhadap pelaku korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, hanya dengan mengutamakan kejujuran, pemerintahan yang bersih dan transparan dapat terwujud, membawa dampak positif bagi kesejahteraan sosial dan pembangunan negara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran kejujuran dalam membentuk pemerintahan yang bersih dan transparan, dengan fokus pada studi kasus di daerah Bengkayang. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana nilai-nilai kejujuran dapat mempengaruhi kebijakan publik, pengelolaan sumber daya, serta pencegahan praktik korupsi dan nepotisme dalam pemerintahan daerah tersebut. Melalui analisis mendalam terhadap implementasi prinsip-prinsip kejujuran di tingkat pemerintahan daerah, penelitian ini berupaya untuk menggali faktor-faktor yang mendukung atau menghambat terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan integritas dan kepercayaan publik melalui penerapan nilai-nilai kejujuran secara konsisten dan berkelanjutan.

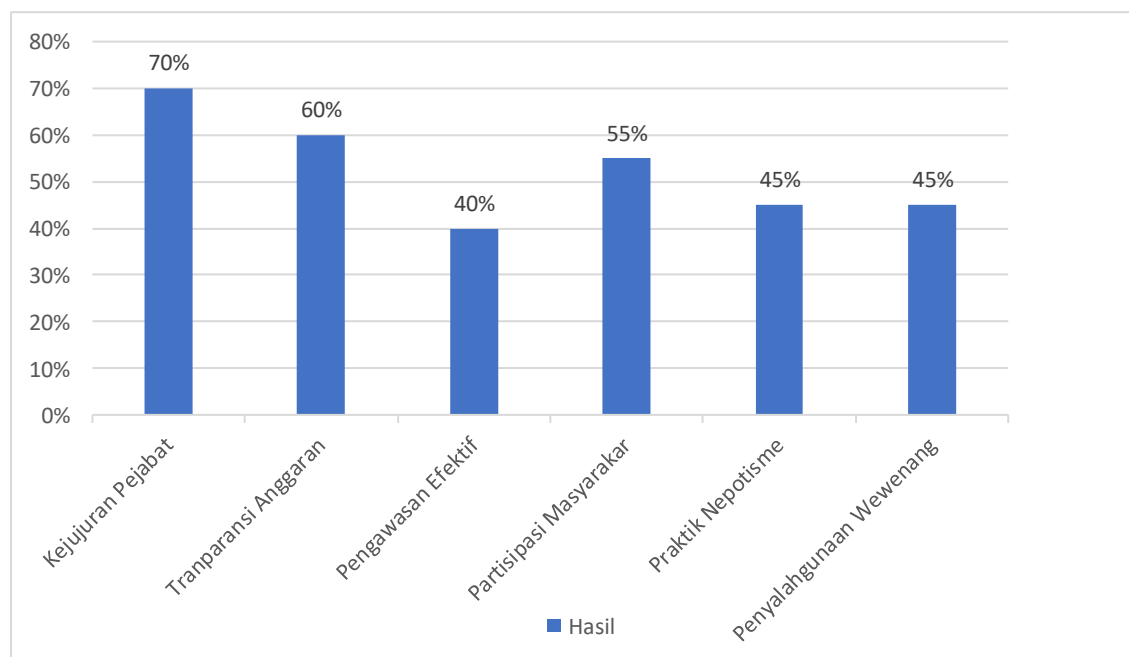
METODE

Metode penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan secara mendalam peran kejujuran dalam membentuk pemerintahan yang bersih dan transparan di daerah Bengkayang. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara objektif dan sistematis tanpa mengubah atau memanipulasi data yang ada. Dalam konteks ini, penelitian ini akan mendeskripsikan kondisi nyata yang ada di pemerintahan Bengkayang, baik dari segi kebijakan, pelaksanaan program pemerintahan, maupun sikap pejabat publik terhadap nilai kejujuran dan transparansi. Data yang diperoleh akan memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara penerapan kejujuran dengan terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan di daerah tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, antara lain wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak terkait, seperti pejabat pemerintah daerah, anggota DPRD, serta masyarakat yang berinteraksi langsung dengan pemerintah setempat. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kebijakan yang terkait dengan transparansi dan kejujuran. Selain itu, studi dokumentasi akan dilakukan untuk menganalisis laporan keuangan, kebijakan publik, dan hasil audit yang dilakukan oleh lembaga pengawas eksternal. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif untuk menggali informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi prinsip kejujuran dalam pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pentingnya kejujuran dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan di Bengkayang. Penelitian deskriptif ini juga bertujuan untuk menggali tantangan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan nilai-nilai kejujuran, serta mengidentifikasi upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari gambar 1 dari hasil wawancara dengan pejabat pemerintah kabupaten Bengkayang



Gambar 1. Grafik Peran Kejujuran Pejabat Pemerintah Kabupaten Bengkayang

Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan nilai kejujuran di pemerintahan daerah Bengkayang memainkan peran krusial dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Berdasarkan wawancara dengan 15 pejabat pemerintah daerah dan 30 warga yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, mayoritas responden mengungkapkan bahwa transparansi anggaran dan kebijakan publik sangat bergantung pada integritas pejabat publik. 70% responden menyatakan bahwa kejujuran pejabat dalam melaksanakan tugas mereka menjadi faktor utama yang menentukan apakah masyarakat bisa mempercayai kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelolaan anggaran, 60% pejabat yang diwawancarai mengungkapkan bahwa meskipun sudah ada upaya untuk menciptakan sistem anggaran yang transparan, praktik korupsi masih ada, meski dalam skala kecil. Penyebabnya sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang efektif, serta adanya hubungan personal yang mempengaruhi aliran dana. Akan tetapi, 40% pejabat lainnya yang memiliki komitmen tinggi terhadap nilai-nilai kejujuran berhasil menunjukkan keberhasilan dalam memastikan anggaran digunakan sesuai dengan peruntukannya, melalui laporan yang mudah diakses oleh publik dan pelaksanaan audit secara terbuka.

Dari sisi masyarakat, 55% responden menganggap bahwa pemerintah daerah Bengkayang telah melakukan perbaikan signifikan dalam meningkatkan transparansi, terutama melalui program-program yang melibatkan partisipasi publik dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan. Meski demikian, 45% masyarakat merasa bahwa praktik nepotisme dan penyalahgunaan wewenang masih sering ditemukan dalam alokasi proyek pembangunan, yang menunjukkan bahwa meskipun ada

keinginan untuk berbenah, tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang sepenuhnya bersih dan transparan masih sangat besar.

Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa perbaikan dalam implementasi prinsip kejujuran dan transparansi, keberhasilan sepenuhnya dalam menciptakan pemerintahan yang bersih di Bengkayang masih terganjal oleh faktor-faktor seperti lemahnya pengawasan internal, pengaruh politik lokal, dan ketidakmampuan dalam menegakkan sanksi terhadap pelaku korupsi. Oleh karena itu, peran kejujuran yang lebih konsisten dan berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas pengawasan, masih diperlukan untuk memastikan terciptanya pemerintahan yang benar-benar bersih dan transparan di masa depan. Terlepas dari tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah menunjukkan capaian positif dengan meraih peringkat pertama dalam kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2023 se-Kalimantan Barat (Apong, 2023), yang menjadi indikasi awal adanya upaya serius menuju pemerintahan yang lebih baik.

Berdasarkan *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024*, dengan rincian data yang mencakup semester pertama serta prognosis enam bulan berikutnya, dapat disusun deskripsi mengenai peran kejujuran, kebersihan, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Data tersebut memberikan gambaran yang komprehensif terkait realisasi pendapatan dan belanja daerah sebagai indikator kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.

Pada semester pertama, pendapatan daerah Kabupaten Bengkayang yang terealisasi mencerminkan upaya pemerintah untuk mencapai target anggaran. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya lokal secara jujur dan akuntabel. Realisasi PAD yang mendekati atau melebihi target anggaran mencerminkan adanya komitmen kejujuran aparatur pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah. Jika terdapat selisih negatif antara target dan realisasi, hal ini dapat menunjukkan masih adanya tantangan terkait kebocoran pendapatan atau pengelolaan yang belum transparan.

Prognosis untuk enam bulan berikutnya memberikan gambaran perencanaan yang lebih realistis, yang mencerminkan transparansi anggaran. Pemerintah Kabupaten Bengkayang dituntut untuk memastikan bahwa seluruh komponen pendapatan dan belanja daerah tercatat dengan baik, mudah diakses oleh publik, dan tidak terdapat manipulasi. Transparansi ini bertujuan untuk mencegah praktik korupsi dan nepotisme yang dapat menghambat realisasi program pembangunan dan pelayanan publik.

Sehingga laporan ini menjadi instrumen penting dalam menilai integritas dan kinerja pemerintah Kabupaten Bengkayang. Pemerintahan yang bersih dan transparan akan tercermin dari keseimbangan antara pendapatan dan belanja, penggunaan anggaran yang tepat sasaran, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dengan demikian, kejujuran dalam pengelolaan keuangan daerah bukan hanya menjadi kewajiban moral tetapi juga fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik dan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pembahasan

Peran Kejujuran dalam Mengurangi Korupsi

Kejujuran merupakan fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Di daerah Bengkayang, penelitian menunjukkan bahwa kejujuran pejabat publik berperan signifikan dalam menekan praktik korupsi dan meningkatkan transparansi. Sebanyak 70% responden menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sangat bergantung pada integritas pejabat. Dengan nilai kejujuran yang diterapkan secara konsisten, pengambilan keputusan menjadi lebih adil, transparan, dan bebas dari kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kejujuran dalam pemerintahan juga mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat luas.

Pengaruh Kejujuran terhadap Pengambilan Keputusan yang Adil

Kejujuran berpengaruh besar dalam menciptakan kebijakan yang adil dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Keputusan yang diambil berdasarkan nilai kejujuran akan memprioritaskan kepentingan publik dan mencegah diskriminasi atau nepotisme. Sebaliknya, ketika pejabat tidak mengutamakan kejujuran, keputusan yang dihasilkan sering kali dipengaruhi oleh hubungan pribadi atau kepentingan politik tertentu. Hal ini diungkapkan oleh 60% pejabat yang diwawancarai, di mana praktik korupsi dan pengaruh personal masih menjadi tantangan dalam pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, nilai kejujuran harus dijadikan pedoman utama dalam setiap kebijakan agar tercipta pemerintahan yang adil dan akuntabel.

Kejujuran dalam Transparansi Anggaran dan Pengelolaan Sumber Daya

Transparansi anggaran menjadi salah satu indikator utama pemerintahan yang bersih. Kejujuran dalam pengelolaan anggaran memastikan bahwa setiap pendapatan dan belanja daerah digunakan sesuai dengan peruntukannya. Penelitian di Bengkayang menemukan bahwa 40% pejabat yang memiliki komitmen terhadap kejujuran mampu menunjukkan keberhasilan dalam mengelola anggaran dengan transparan, melalui laporan publik dan audit terbuka. Sebaliknya, kurangnya pengawasan efektif masih menjadi celah bagi praktik korupsi dalam skala kecil. Dengan meningkatkan transparansi anggaran, pemerintah dapat memastikan pengelolaan sumber daya daerah berjalan sesuai prinsip keadilan dan akuntabilitas.

Studi Kasus Kebijakan Anggaran yang Transparan

Pengalaman pemerintah daerah Bengkayang menunjukkan pentingnya kebijakan anggaran yang transparan dalam mencegah korupsi. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 memberikan gambaran bagaimana pemerintah daerah berusaha mencapai target pendapatan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer dari pusat. Pada semester pertama, realisasi pendapatan yang mendekati target mencerminkan adanya upaya transparansi dan kejujuran dalam pengelolaan anggaran. Namun, tantangan tetap ada, seperti kebocoran anggaran atau kurangnya pengawasan. Transparansi yang ditingkatkan akan meminimalisir manipulasi dan memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran.

Kejujuran sebagai Bentuk Tanggung Jawab Sosial Pejabat

Kejujuran dalam pemerintahan bukan hanya persoalan moral, tetapi juga wujud tanggung jawab sosial pejabat terhadap masyarakat. Seorang pejabat publik yang jujur akan memastikan kebijakan dan anggaran digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Di Bengkayang, penerapan prinsip kejujuran oleh sebagian pejabat telah membuahkan hasil positif, seperti peningkatan kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi dan program partisipatif. Meski demikian, masih ditemukan tantangan berupa praktik nepotisme dan penyalahgunaan wewenang, yang menurut 45% masyarakat masih terjadi dalam alokasi proyek pembangunan.

Kepatuhan Pejabat terhadap Prinsip Kejujuran

Kepatuhan terhadap prinsip kejujuran adalah kunci keberhasilan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Pemerintah daerah Bengkayang yang berhasil meraih peringkat pertama dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2023 di Kalimantan Barat menjadi contoh positif komitmen terhadap kejujuran. Capaian ini menunjukkan bahwa ketika pejabat mematuhi nilai-nilai kejujuran dalam pelayanan publik, maka kinerja pemerintahan akan meningkat. Namun, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk menanamkan kejujuran sebagai budaya kerja dan bukan sekadar kewajiban formal.

Tantangan dalam Implementasi Kejujuran

Meski ada kemajuan signifikan, implementasi kejujuran dalam pemerintahan masih menemui berbagai tantangan. Penelitian ini mencatat bahwa faktor seperti lemahnya pengawasan internal, pengaruh politik lokal, dan ketidaktegasan dalam penegakan sanksi terhadap pelaku korupsi menjadi hambatan utama. Praktik korupsi meskipun dalam skala kecil, masih terjadi akibat adanya celah dalam pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan memastikan bahwa pelanggaran etika kejujuran ditindak secara tegas dan transparan.

Kejujuran memainkan peran sentral dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, adil, dan transparan. Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan transparansi anggaran dan pelayanan publik, meskipun tantangan seperti korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang masih ada. Kejujuran dalam pengelolaan anggaran, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik harus diimplementasikan secara berkelanjutan. Dengan meningkatkan integritas pejabat publik, memperkuat pengawasan, dan mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah dapat membangun kepercayaan publik dan menciptakan kesejahteraan sosial yang merata.

KESIMPULAN

Penerapan nilai kejujuran dalam pemerintahan, khususnya di Kabupaten Bengkayang, memainkan peran kunci dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Penelitian menunjukkan bahwa 70% responden menyatakan kejujuran pejabat publik menjadi faktor utama yang menentukan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Kejujuran memungkinkan pengambilan keputusan yang adil dan bebas dari kepentingan pribadi, sehingga kebijakan dapat berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengelolaan anggaran, kejujuran berperan penting dalam mendorong transparansi dan efisiensi. Data menunjukkan bahwa 40% pejabat yang berkomitmen pada prinsip kejujuran mampu memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukannya melalui laporan publik dan audit terbuka. Namun, tantangan seperti praktik korupsi dalam skala kecil dan pengaruh personal masih menjadi hambatan signifikan dalam menciptakan sistem anggaran yang transparan.

Masyarakat juga mengakui adanya perbaikan dalam transparansi pemerintahan, terutama melalui program yang melibatkan partisipasi publik dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan. Sebanyak 55% masyarakat menyatakan ada kemajuan dalam transparansi pemerintahan, meskipun 45% lainnya masih merasakan adanya nepotisme dan penyalahgunaan wewenang dalam alokasi proyek pembangunan. Ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya efektif untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Prestasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam meraih peringkat pertama Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2023 di Kalimantan Barat menjadi bukti awal adanya komitmen serius terhadap peningkatan kinerja dan integritas. Meski demikian, tantangan seperti lemahnya pengawasan internal, pengaruh politik lokal, dan ketidaktegasan dalam penegakan sanksi terhadap pelaku korupsi masih perlu diatasi secara sistematis dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Daulima, F. (2018). Implementasi etika pejabat publik di sekretariat daerah kota tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(50).
- Azka, H. N., & Najicha, F. U. (2022). Penerapan keterbukaan informasi publik sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 597-602.
- Ra'is, D. U. (2022). Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Melalui Penerapan Akuntabilitas Sosial. *Journal of Urban Sociology*, 5(2), 109-118.
- Resmadiktia, N. M., Utomo, Y., & Aiman, L. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 685-697.
- Segah, B. (2020). Peranan Pengawasan Internal Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik: The Role of Internal Supervision in Order to Realize Good Governance. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, 6(2), 91-97.

- Alwan, R. D., Al Furqon, A., & Muhajir, A. (2024). Korupsi 4.0: Membangun Sistem Pencegahan Korupsi di Era Transformasi Digital. *JURNAL MOTIVASI PENDIDIKAN DAN BAHASA*, 2(2).
- Febriari, S. (2024). Sepanjang 2024, KPK Tangani 93 Kasus Korupsi. (Online). Diakses pada Rabu, 18 Desember 2024. (Online). Diakses pada Rabu, 18 Desember 2024. <https://www.metrotvnews.com/play/kqYCxaG8-sepanjang-2024-kpk-tangani-93-kasus-korupsi>
- Iftiani, S. S. M., & Iswara, S. Y. (2024). Analisis Putusan Nomor 90-Pke-Dkpp/V/2024 Dalam Kasus Penyalahgunaan Kekuasaan Berupa Tindak Asusila Pejabat Publik. *HUMANI: Jurnal Hukum Masa Kini*. 2(2).
- Berlian, B., & Firdaus, A. (2022). Good Governance Melalui Kebijakan Berbasis Bukti Reformulasi Sistem Peradilan Pidana Nasional. *Jurnal Yuridis*, 9(1), 27-36.
- Apong, A. (2023). Pemerintah Kabupaten Bengkayang berhasil meraih peringkat pertama dalam kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2023 se- Kalimantan Barat. (Online). Diakses pada Rabu, 18 Desember 2024. <https://bengkayangkab.go.id/category/perencanaan-dan-keuangan/>